

Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat UMKM Kota Surabaya

(Studi Pada Pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya)

Gatot Kurniawan; Anggraeny Puspaningtyas; Achluddin Ibnu Rochim

Email : gatotk28@gmail.com; anggraenypuspa@untag-sby.ac.id; didin@untag-sby.ac.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945

Abstrak

Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM di kampung Dolly Surabaya sangat perlu dilakukan karena membutuhkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM serta upaya dalam mendorong perkembangan ekonomi di kampung Dolly Surabaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM beserta Dinas Perdagangan dalam pengembangan ekonomi lokal pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dengan para *key persons*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kampung Dolly merupakan daerah yang terdapat banyak UMKM, lokasi ini terletak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Surabaya beserta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya telah melakukan pembinaan berupa seminar; pelatihan/*workshop*; membimbing dan memfasilitasi serta memberdayakan UMKM yang berada di kampung Dolly Surabaya, sehingga perekonomian di daerah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 mengenai pemberdayaan UMKM. Kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah dalam pemberdayaan ini, warga terdampak eks lokalisasi prostitusi Dolly Surabaya baik secara langsung maupun tidak langsung bisa mengembangkan ekonomi lokal, untuk itu pelaku usaha UMKM mampu bangkit dan berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pengembangan ekonomi lokal, UMKM, Pemberdayaan.

Abstract

Local economic development through the empowerment of MSMEs in Dolly Surabaya village is very necessary because it requires sustainable economic development. The purpose of the research was to find out the application of Regional Regulation No. 6 of 2011 on the empowerment of MSMEs and efforts to encourage economic development in Dolly Village Surabaya. The method used is descriptive qualitative which aims to find out how the role of the Cooperative and MSME Office and the Trade Office in local economic development on community empowerment through MSMEs with key person. Data collection techniques carried out are by means of interviews, observations, and documentation. Dolly Village is an area with many MSMEs, this location is located in Putat Jaya Village, Sawahan District, Surabaya City. The results of the study showed that the Surabaya Trade Office and the Office of Cooperatives and MSMEs in Surabaya had conducted coaching in the form of seminars; training / workshop; guiding and facilitating and empowering MSMEs located in Dolly Surabaya village, so that the economy in the area has increased significantly. This shows that the local government has implemented Regional Regulation No. 6 of 2011 on the empowerment of MSMEs. The conclusion obtained by the researchers is in this empowerment, residents affected by the ex-prostitution localization Dolly Surabaya either directly or indirectly can develop the local economy, for that MSME businesses are able to rise up and stand alone without the help of the local government.

Keywords: Local economic development, MSMEs, Empowerment.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi diantaranya adalah kebutuhan untuk memenuhi rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya. Selain itu masyarakat juga dituntut serta dihadapkan dengan kebutuhan dan penghasilan kerja yang tidak menentu. Demi menanggulangi hal tersebut, maka masyarakat dituntut mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri untuk membantu di sektor perekonomian. Dengan menciptakannya sektor perekonomian seperti di era globalisasi yang bertujuan untuk menanggulangi sebagai tolak ukur keberhasilan perekonomian, maka dari itu dibutuhkan peran serta pemerintah dalam mencampuri dan mengurus masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian mengingat bahwa adanya peraturan pusat maka pemerintah perlu mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada pasal (3) yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan(Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008). Pada peraturan Daerah Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku

pembangunan ekonomi Jawa Timur perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,(Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan USsaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan individu maupun kelompok yang peranannya sangat penting dan sangat dominan dalam kehidupan sehari – hari, untuk itu dalam perkembangan pendapatan ekonomi yang dinyatakan sebagai salah satu pelaku ekonomi perlu adanya pemberdayaan dari sebuah instansi-instansi sektoral terkait yang menaungi. Dewasa ini dalam pembinaan yang dilakukan oleh instansi telah melakukan berbagai hal kemampuan yang ada. Salah satu instansi terkait adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengerahkan pada UMKM yang sangat kompetitif. Selanjutnya pembinaan yang dilakukannya oleh instansi melalui berbagai cara diantaranya adalah melalui pemberian pelatihan, sosialisasi, pemantauan secara terus menerus dengan tujuan supaya pengembangan ekonomi pada suatu wilayah / daerah semakin

bertambah dan merata bagi para pelaku usaha. Dengan memberdayakan pelaku UMKM maka diharapkan mampu mendapatkan dan menciptakan kesejahteraan usaha, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas untuk mengelola sumber daya manusia yang awalnya tidak mempunyai kemampuan menjadi memiliki keahlian, sehingga pemberdayaan ini masyarakat mampu untuk hidup mandiri.

Sementara untuk meningkatkan daya dukung pada pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya ini, peneliti menggunakan model teori yakni permasalahan yang sangat krusial dan telah dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebenarnya para aktor pelaku usaha memiliki potensi yang sangat besar sekali, namun masih banyak hambatan bagi mereka dalam mengembangkan kapasitas dan akses sumberdaya produktif. Untuk mengetahui permasalahan apa saja, maka peneliti berasumsi, yakni : (1) “Akses Permodalan”. Permasalahan pertama kali yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah hambatan modal, oleh karenanya modal ini sangat rentan dan mempengaruhi dalam menciptakan usaha yang digeluti para pelaku usaha untuk menopang demi keberlangsungan

masyarakat; (2) “Sarana dan prasarana”. Dalam sarana dan prasana yang dimiliki oleh para pelaku usaha sangat terbatas, hal ini dikarenakan salah satu diantaranya adalah ketersediaan tempat yang digunakan untuk menjual hasil produk yang dihasilkan; (3) “Akses Pemasaran”. Pada akses pemasaran yang selalu dihadapi oleh para pelaku usaha yakni keterbatasan keluar masuknya barang pada dunia usaha. Kendati demikian dikarenakan semakin banyaknya kelompok usaha dalam bersaing untuk memasarkan hasil produk yang dihasilkan oleh para UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah); (4) “Sumber Daya Manusia”. Keterbatasan sumber daya pengetahuan dalam mengelola serta menciptakan produk biasanya sangat terbatas dikarenakan para pelaku usaha selalu mengikuti perkembangan zaman.(Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2013)

Kota Surabaya merupakan salah satu Ibukota Provinsi yang berada di Jawa Timur, dengan pertumbuhan dan perkembangan wirausaha seperti UMKM yang sangat cepat, tentunya perkembangan UMKM di Surabaya dari tahun ke tahun telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Terbukti adanya data yang dapat disajikan pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017

Tahun	UMKM (Orang)	Usaha Mikro dan Kecil
2014	27.926	25.353

2015	28.391	25.147
2016	28.759	26.037
2017	29.507	26.800

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM. 2017

Dari data tabel 1.1 menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyebutkan bahwa UMKM Surabaya tahun 2017 mencapai 29.507 usaha. Dalam upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya peran serta dari pemerintah dalam mengembangkan potensi UMKM yang ada, salah satunya yang ada di Surabaya yaitu Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang memiliki peran untuk membantu mengembangkan dalam potensi UMKM yang ada. Dengan ini menjadikan jembatan antara pelaku usaha dengan Dinas Perdagangan kota Surabaya pada pemasaran produk, tujuannya tidak lain adalah agar bisa bersaing dengan produk negara lain dengan mengikuti pembinaan yang telah disiapkan oleh Dinas secara gratis (Amiruddin, 2018).

Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat terhadap UMKM Jawa Timur yang ditujukan kepada UMKM Dolly Surabaya ini merupakan sebuah program yang telah dibuat untuk masyarakat *stakeholder* yang lemah, dengan berdasarkan pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan mengembangkan terhadap Usaha, Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu

berkembang menjadi tangguh dan mandiri. Sejalan dengan perkembangan waktu ke waktu, maka diperlukan adanya progam pemberdayaan dari dinas terkait. Mengenai UMKM Dolly yang berkenaan dengan perlu adanya sebuah penerapan ini bisa diartikan sebagai tindakan yang direncanakan secara terencana dan tersusun dengan cermat.

Mengingat adanya pemberdayaan masyarakat pada UMKM Dolly Surabaya maka dibutuhkan konsep pengembangan ekonomi lokal yang berdasarkan pada ekonomi di suatu wilayah itu, yang bisa bertujuan untuk mengurangi jumlah angka pengangguran demi melibatkan masyarakat dan meningkatkan dalam pekerjaan pada lapangan kerja serta menumbuhkan industri usaha dalam memperbaiki kondisi dimana seperti aspek ekonomi dan sosial yang lebih meningkatkan dalam kesejahteraan ekonomi dan juga berfungsi untuk mempercepat tumbuhnya ekonomi pada daerah yang tertinggal.

Peran yang dijalankan oleh pemerintah / sekelompok organisasi itu ikut terlibat dalam memberikan dorongan kepada aktivitas usaha yang telah dilakukan ke lapangan kerja. Dalam pengembangan ekonomi lokal ini merupakan sebuah proses yang mengaitkan dengan perkembangan industri baru, serta

pengembangan kapasitas pekerja yang menghasilkan produk guna lebih bermutu, menumbuhkan pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru.

UMKM memperluas usaha yang lebih meningkat dengan keberadaan UMKM Dolly Surabaya, sebagai pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah Peraturan Gubernur melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Dinas Perdagangan dan Industri Kota Surabaya berwenang sebagai aktor pelaku dalam kepentingan berusaha menggali potensi usaha yang digeluti oleh para *stakeholder* yang berpotensi rentan akan sosial dan ekonomi di lingkungan kawasan Dolly Surabaya, dengan tujuan untuk mendorong dan mendukung demi kemandirian di sebagian atau seluruh aktor pelaku usaha UMKM Dolly Surabaya.

Pengembangan ekonomi lokal terhadap pemberdayaan masyarakat UMKM Dolly ini sebagai dinas yang dicanangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 diperintahkan untuk menumbuhkan serta mendorong demi tercapainya suatu program pada pemberdayaan UMKM. Pengembangan ini di dasarkan untuk menekankan pada pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pada tingkat ini adalah tingkat yang paling mendasar dikarenakan tingkatan ini mengarahkan kepada para pelaku usaha untuk mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di wilayah / daerah Dolly.

Peneliti melihat dari tujuan sebagai arah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Seberapa jauh dari penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya.
2. Apa sajakah upaya dalam mendorong perkembangan ekonomi Dolly Surabaya.

Tentunya pada Pembangunan ekonomi menurut Siagian (Rahmadanik, Mardiyono, & Wachid, 2014), pembangunan ekonomi sendiri bisa diartikan sebagai “rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Dengan adanya pembangunan ekonomi ini diharap dapat meningkatkan serta menumbuhkan jumlah hasil yang diperoleh pada suatu wilayah yang tidak lain adalah negara berkembang. Kemudian menurut (Suryono, 2010 : 30) mengenai Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan seluas – luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik.

Konsep pembangunan ekonomi ini, perlu diketahui bahwa antara pertumbuhan dan pembangunan ada suatu perbedaan namun adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Konsep pembangunan ekonomi ini merupakan suatu proses yang menentukan usaha yang berkelanjutan. Konsep ini juga sebenarnya bisa dikupas melalui teori pertumbuhan dan pembangunan, yang mana dari konteks tersebut bisa diartikan atau dianalisis secara kritis tergantung kondisi dimana negara itu sendiri. Walaupun tidak semua model dapat digunakan, namun perbincangan mengenai peranan faktor seperti modal, usaha, kemampuan usaha bisa digunakan untuk menjelaskan sebab – akibat dari berlakunya pembangunan dalam suatu negara.

Menurut Sulistiyani(Nugroho, 2017 : 2) menyebutkan mengenai pemberdayaan “secara etimologi berasal dari daya yang bisa diartikan sebagai kekuatan / kemampuan yang dimaknai dengan proses untuk memperoleh daya, kekuatan / proses pemberian dorongan dari pihak yang mempunyai / memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya”.

Pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011 :19) adalah “upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan

tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri”.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005: 25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah “membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat”.

Menurut Wrihatnolo (2017 : 2), Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahap yaitu :
- *Pertama* adalah penyadaran. Tahap ini target yang hendak diberdayakan diberikan pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin, kepada

mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan. Program yang dapat dilakukan ini missal memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi dan belief. Prinsip dasar adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu membangun dan proses pemberdayaan di mulai dari dalam diri.

- *Kedua* adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut *capacity building*. Dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan. Untuk diberikan daya / kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah seharusnya daerah yang diotonomkan diberi program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonom yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis yaitu manusia; organisasi; dan sistem nilai.
- *Ketiga* adalah pemberian daya. Tahap ini target diberikan daya; kekuatan; otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Prosedur pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun kita sering kali tidak cakap menjalankan karena mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011, Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan penguatan permodalan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagaimana yang telah dibuat maka Dinas menyusun petunjuk teknis guna memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing meliputi bidang : bahan baku; teknologi produksi; pengembangan desain produk dan kemasan; pemasaran; sumber daya manusia.

Sedangkan menurut Supardi, (1987: 24) mengartikan sebagai pengembangan masyarakat adalah “suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka. Pengembangan masyarakat juga merupakan suatu gerakan untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berpartisipasi aktif dan inisiatif masyarakat”.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu usaha yang digeluti / dimiliki oleh perorangan / badan usaha secara mandiri. Usaha ini sangat digandrungi oleh masyarakat kecil, dewasa ini jika melihat pemuda pemudi di lingkungan semua daerah sangatlah banyak bila dibandingkan dengan orang – orang tua. Dengan banyaknya pemuda pemudi bila tidak adanya dorongan dari luar misalnya dari pemerintah daerah untuk mendorong demi pertumbuhannya ekonomi di suatu daerah maka akan timbul adanya ketimpangan. Untuk menanggulangi maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah hanya memerlukan modal yang tidak besar.

Usaha mikro kecil dan menengah ini juga memiliki kriteria, yang mana dari usaha masing – masing mempunyai pendapatan(penghasilan) yang tidak sama, berbeda dengan UKM (UsahaKecil Menengah) yang membutuhkan biaya sangat besar, dikarenakan sumber daya manusia yang dibutuhkan lebih besar bila dibandingkan

UMKM (UU No. 20 tahun 2008) : Usaha mikro dalam perekonomian produktif yang notabennya dimiliki oleh perorangan. Usaha ini memiliki usaha kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan; Usaha kecil dalam perekonomian produktif yang notabennya adalah sebagai bentukan sendiri, baik yang dibentuk atas dasar individu maupun secara kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dalam usaha ini hanya dimiliki oleh perorangan dengan kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp 500.000.000,- ; Usaha menengah dalam perekonomian produktif yang notabennya bukan merupakan suatu cabang / anak perusahaan. Usaha ini adalah bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu usaha kecil atau besar dengan total kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- usaha ini tidak termasuk tanah ataupun bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan peran Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan dalam pengembangan ekonomi lokal pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Dolly Surabaya dengan para aktor pelaku usaha. Pada metode ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksana yang

buat, apakah sudah terlaksana dan apakah ada perubahan pada fenomena sosial; ekonomi yang terjadi di kawasan Dolly Surabaya, karena adanya dukungan yang diberikan oleh dinas – dinas terkait pada pelaku UMKM untuk mendorong dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah kampung Dolly Surabaya, yang mana lokasi tersebut adalah banyak sekali sumber daya

manusia yang bisa dimanfaatkan sebagai pelaku usaha UMKM. Kampung Dolly terdapat di Jalan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam penetapan ini, akan sangat penting dikarenakan tahap ini berpotensi sebagai sumber daya manusia yang sangat besar untuk merubah *mindset* perekonomian yang berawal dari tempat prostitusi terbesar se-

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya

Dalam pemberdayaan UMKM bahwa pelaku usaha kampung UMKM kreatif Putat Jaya gang A atau yang disingkat menjadi (PUJAA) telah mendapatkan perhatian dari berbagai Dinas Kota Surabaya. Pada pemberdayaan UMKM, pelaku usaha kampung kreatif tersebut mendapatkan binaan dengan cara peningkatan modal yang secara nyata ditujukan pada bank tertentu yang telah ditunjuk untuk mengurus mengenai permodalan yang di butuhkan, hal ini sebagai dinas membantu menjembatani antara pihak bank dengan pelaku usaha; kemudian dengan adanya peningkatan laba, sebagai dinas memberikan fasilitas pemberdayaan dengan cara mengikut sertakan pada acara event dan promosi; untuk itu dinas memberikan kemampuan manajemen yang bertujuan memperbaiki sistem keuangan dengan adanya seminar, cara ini dilakukan guna memberikan pada

Asia Tenggara kemudian beralih fungsi menjadi tempat tujuan wisata UMKM.

Fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM di Dolly Surabaya beserta upaya apa saja yang digunakan pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong perkembangan ekonomi.

skala usaha yang digeluti pelaku usaha kampung kreatif semakin baik. Bukti nyata dalam pengembangan ekonomi, kampung (PUJA_A) mendapatkan campur tangan melalui bimbingan; fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Dari Dinas Koperasi dan UMKM pun memberikan fasilitasi berupa legalitas produk halal. Sehubungan dengan teori pembangunan (Suryono, 2010 : 30) menjelaskan dengan adanya pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM, sebagaimana masyarakat yang telah terbelenggu atas dasar pengangguran diberikan wewenang atas kepedulian untuk menciptakan / berkarya demi pembangunan ekonomi. Kemudian peneliti menghubungkan teori pemberdayaan dari Sulistiyati (Nugroho, 2017: 2), menjelaskan : sebagai dinas berupaya mendorong masyarakat yang tertuju pada pelaku usaha demi terciptanya kemandirian dalam jangka panjang. Dalam hal ini pelaku usaha sudah mampu hidup mandiri dan mampu lepas dari keterpurukan dari belenggu permasalahan

yang dihadapi oleh masyarakat dikampung (PUJA_A), sehingga dinas Koperasi dan UMKM mampu melepaskan warga terdampak eks lokalisasi prostitusi.

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan di kampung UMKM tempe Bang Jarwo pun mendapatkan perhatian dari Dinas Kota Surabaya, salah satunya dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya dengan memberikan bantuan berupa modal bahan baku kedelai; sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya memberikan binaan melalui seminar serta pelatihan pembuatan produk inovasi baru berupa olahan makanan inovasi tempe; fasilitas lain yang diberikan pun juga pada keikutsertaan acara event dan promosi. Bukti nyata dalam pengembangan ekonomi, kampung UMKM tempe Bang Jarwo rumah produksi tempe setiap hari mengalami peningkatan. Dengan adanya usaha ini, rumah produksi mampu mengerahkan masyarakat sekitar guna mampu memperbaiki kondisi masyarakat di sekitar. Sehubungan dengan teori pembangunan (Suryono, 2010 : 30) menjelaskan sebagai pembangunan yang merupakan adanya proses perubahan baik sosial yang ada di kampung UMKM tempe terdapat suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat demi mewujudkan perubahan demi pemerataan pendapatan ekonomi. Kemudian peneliti menghubungkan teori pemberdayaan dari Sumaryadi (2005: 25) menjelaskan dengan adanya suatu kekuatan

yang bertujuan untuk mendorong kaum lemah / tidak berdaya, salah satu faktor penggerak adalah dinas yang bertanggung jawab. Dewasa ini sebagai dinas membantu untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan seperti pembuatan branding, marketing yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi.

Pemberdayaan UMKM batik tulis Jarak Arum juga mendapatkan perhatian melalui Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Dalam pemberdayaan yang dijalankan, Dinas Perdagangan Kota Surabaya memberikan binaan melalui pelatihan pembuatan rumah produksi batik. Dengan adanya peningkatan laba, pelaku usaha batik Jarak Arum di bantu oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dengan adanya seminar dan disediakan tempat lokasi guna mempromosikan hasil kain batik. Dalam pengembangannya pelaku usaha membuktikan sebagaimana Dinas Perdagangan Kota Surabaya terhadap pelaku usaha mampu menciptakan hasil kain batik serta mampu merangkul masyarakat untuk berpartisipasi. Hasil yang dilakukan pelaku usaha pun mendapat fasilitas berupa titik lokasi yang telah disediakan yakni : KBS (Kebun Binatang Surabaya); Rumah Sakit Suwandi; Bungurasih; Tanjung Perak; Merr; Delta dan Siola. Sehubungan dengan teori pembangunan dari (Suryono, 2010 : 30) menjelaskan bahwa Pembangunan merupakan adanya suatu proses perubahan

sosial pada masyarakat yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan seluas – luasnya pada warga masyarakat terdampak untuk berpartisipasi, dalam mendapatkan kemajuan baik secara sosial yang disebabkan penutupan lokalisasi dengan wujud nyata bagi mayoritas warga terdampak masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik. Kemudian peneliti menghubungkan teori pemberdayaan dari Sumpeno (2011: 19) menjelaskan upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan masyarakat yakni dinas terhadap tatanan yang lemah, agar mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya Pemerintah demi mendorong dan memperbaiki wujud dengan memberikan fasilitasi berupa pembinaan berupa pelatihan pembuatan kain batik di rumah batik dan memberikan fasilitas berupa layanan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan / Perorangan) serta merk.

Senada dengan pemberdayaan UMKM pada pelaku usaha pita Dolly pun mendapatkan perhatian dari dinas terkait, yakni Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang turut membina dengan memberikan pelatihan hingga mampu berdiri sendiri. Pada pemberdayaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya memberikan pelatihan berupa pembuatan kerajinan tangan. Dalam fasilitas yang diberikan dinas terkait mampu menyediakan tempat untuk melaksanakan

pameran /promosi, cara ini dilakukan supaya pelaku usaha pita Dolly dapat meningkatkan pembangunan daerah dengan meningkatkan penjualan. Bukti nyata pengembangan ekonomi mengalami peningkatan. Hasil menunjukkan produk yang dihasilkan sudah tercapai dari penjualan, hasil penjualan ini juga tidak terlepas adanya dinas yang telah ikut menyediakan tempat di titik yang telah ditentukan. Dalam pengembangan, pelaku usaha mampu menghasilkan kerudung ecoprint, bross, sepatu dan sandal anyaman dan lain – lain. Sehubungan dengan teori pembangunan dari Pembangunan ekonomi dari Siagian (Rahmadanik, Mardiyono & Wachid, 2014 :1), menjelaskan sebagai adanya usaha dari adanya pertumbuhan serta perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya di kawasan eks lokalisasi untuk pemerataan pendapatan rata – rata pada warga terdampak eks lokalisasi pada jumlah hasil yang diperolehnya. Kemudian peneliti menghubungkan teori pemberdayaan dari Sumaryadi (2005: 25) menjelaskan tujuan diberlakukannya pemberdayaan adalah untuk upaya yang dilakukan pemerintah demi membantu pengembangan ekonomi bagi masyarakat kecil agar pelaku usaha mampu berdiri sendiri dari keterpurukan.

Upaya Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Dolly Surabaya

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya demi mendorong perkembangan ekonomi di eks lokalitas Dolly Surabaya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya perlu mengacu pada perumusan kebijakan rencana strategi Perangkat Daerah yang merupakan strategi dan kebijakan demi mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021.

Berdasarkan perumusan strategi, maka program dan kegiatan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya adalah : memfasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan melalui pembinaan dan seminar, untuk pengembangan modal dinas juga menggandeng guna untuk menjembatani antara pihak BUMN / swasta; pengembangan desiminasi (kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target) terhadap teknologi yang akan digunakan, informasi dan pendampingan dalam pengembangan daya saing usaha mikro; Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam meningkatkan produk usaha mikro; pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam pengembangan daya saing usaha mikro (Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya).

Peneliti menghubungkan teori pemberdayaan menurut Sulistiyani (Nugroho,

2017 : 2) yang menjelaskan bahwa sebagai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya berupaya penuh untuk memberikan dorongan / kekuatan kepada masyarakat terdampak hingga mampu bangkit dan berdiri sendiri, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya juga memberikan monitoring (pemantauan) sebagai kekuatan dalam proses pemberian fasilitas dan pengarahan.

Upaya juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dengan berdasarkan RPJMD renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya tahun 2016-2021, program dan kegiatan yang dilakukan mengacu pada : pemantapan (mendorong) daya saing usaha ekonomi lokal terhadap inovasi produk dan jasa untuk pengembangan industri kecil; perluasan pemasaran dalam jangkauan luas. Cara yang dilakukan melalui adanya rumah produksi batik yang bertujuan untuk pembinaan agar masyarakat terdampak mampu berdiri sendiri (Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya).

Peneliti menghubungkan teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 19) yang menjelaskan bahwa sebagai Dinas Perdagangan Kota Surabaya berupaya untuk mendorong masyarakat terdampak eks lokalitas demi pengembangan ekonomi lokal, tujuan dari pebemberdayaan masyarakat ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat mampu berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah lagi.

Oleh karena itu sebagai dinas yang ditujukan kepada warga yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung memberikan pelatihan ataupun memfasilitasi dengan tujuan warga di eks lokalisasi mampu untuk bangkit dari perekonomian. Dewasa ini sebagai dinas juga ikut terlibat melalui pemberdayaan melalui tahap – tahap yakni sebagai berikut :

Tahapan-Tahapan Dalam Pemberdayaan yang Dijalankan oleh Pemerintah Daerah

Pada tahap pemberdayaan yang dilakukan oleh masing-masing dinas dalam memandirikan masyarakat Dolly Surabaya adalah (Wrihatnolo, 2007 : 2) yakni :

1. Tahap penyadaran. Tahap penyadaran ini masyarakat diberikan kesadaran dan arahan agar masyarakat eks lokalisasi mampu untuk hidup mandiri, sebagaimana dinas yang bertanggung jawab memberikan pencerahan berupa pengetahuan yang sifatnya mengenali sesuatu melalui kondisi lingkungan dan kepercayaan di era globalisasi,

sehingga pada tahap penyadaran ini mereka akan merasa membutuhkan.

2. Tahap pengkapasitasan. Pada tahap kapasitas ini, masyarakat baik individu maupun kelompok diberikan kewenangan untuk mengelola program yang telah diberikan oleh pemerintah daerah melalui dinas seperti pergantian terhadap kemampuan wawasan pengetahuan; keterampilan / kemahiran. Tujuan tidak lain adalah untuk menumbuhkan kelebihan yang mereka miliki sebelumnya yang sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing.
3. Tahap pemberian daya. Pada tahap peningkatan terhadap pemberdayaan / kekuasaan ini masyarakat diberikan peluang kemampuan yang berdasarkan pada kecakapan dalam berinovasi, supaya masyarakat bisa lebih mandiri tanpa menggantungkan orang lain / kelompok organisasi masyarakat.

KESIMPULAN :

Pada penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM yang ada di kampung Dolly (Putat Jaya) Surabaya menyatakan bahwa sudah dilakukannya dan sudah berjalan sesuai dengan amanat peraturan. Dalam pemberdayaan ini, warga terdampak eks

lokalisasi prostitusi Dolly Surabaya baik secara langsung maupun tidak langsung bisa mengembangkan ekonomi lokal, untuk itu pelaku usaha UMKM mampu bangkit dan berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dalam

mendorong perkembangan ekonomi Dolly Surabaya adalah dengan memberikan fasilitas layanan secara gratis dengan cara pemberian pelatihan / bimbingan; serta pendampingan secara terus menerus hingga pelaku usaha mampu secara mandiri, selain itu sebagai Dinas Koperasi dan UMKM beserta Dinas Perdagangan Kota Surabaya juga turut menggandeng pihak dari swasta maupun negeri.

Rekomendasi :

Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan ini, peneliti memberikan perhatian mengenai pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dilakukan oleh Kota Surabaya adalah :

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya, para pelaku usaha masih adanya rasa ragu untuk melangkah maju ke depan dan kurang beraninya untuk mengambil keputusan dalam berwirausaha. Oleh sebab itu dinas juga memberikan arahan selain berupa seminar dan arahan berupa pelatihan-

pelatihan dalam bentuk sebuah makanan yang sedang trending dan tentunya bisa berkolaborasi makanan inovasi baru, sehingga produk unggulan ini nantinya bisa dikenal lebih luas.

2. Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya, para pelaku usaha tidak hanya dibantu dengan cara adanya pelatihan di rumah industri kreatif batik tulis dan membantu pemasaran saja. Namun dinas juga harus membantu dalam hal memonitoring apakah dari setiap pelaku UMKM mampu bersaing dengan UMKM lainnya.

3. Pelaku UMKM Dolly Surabaya.

Dalam keberadaan UMKM Dolly Surabaya yang dulu dipandang sebagai kampung prostitusi se- Asia Tenggara, dengan ini maka perlunya adanya perubahan mised agar masyarakat baik yang berdampak langsung maupun tidak, tidak dipandang sebelah mata. Untuk itu perlu adanya kesadaran dalam jiwa pelaku usaha dalam menciptakan kemandirian dengan berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008. (t.thn.). Dipetik 04 23, 2020, dari www.bi.go.id UU20Tahun2008UMKM.pdf.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan

USsaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (t.thn.). Dipetik 04 20, 2020, dari www.bphn.go.id/data/documents/p_jatim_6_2011.pdf.

Anggraeni, Hardjanto, & Hayat. (2013). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas*

- Pihak Eksternal dan Potensi Internal .
Jurnal Administrasi Negara, h 1287.
- Amiruddin. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan. *Administrasi Negara*, h 2.
- Rahmadanik, Mardiyono, & Wachid. (2014). Pemberdayaan Industri Kecil Olahan Buah Belimbing Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*, h 1.
- Suryono, Agus. (2010) Dimensi - Dimensi Prima Teori Administrasi Pembangunan. Malang, UB press.
- Nugroho. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly Melalui Pengembangan Wirausaha Oleh Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, h 2.
- Wahjudi, Supeno (2011) Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Sumaryadi, I Nyoman (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama.
- Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowito, Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal. 2
- Supardi. (1987). Dakwah Islam Dengan Pengembangan masyarakat desa. h 24-27.
- Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016-2021, 2019. (t.thn) Dipetik 06 04, 2020, dari <https://dinkopum.surabaya.go.id/2019/08/Perubahan-Renstra-2016-2021-2019.pdf>
- Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021, 2021, (t.thn) Dipetik 06 05, 2020, dari http://disperdagin.surabaya.go.id/LAPOPAN/RENSTRA_DINAS_PERDAGANGAN_KOTA_SURABAYA_202016-2021.pdf